

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Penguatan Kelembagaan Dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting Pasca Covid-19 di Kalimantan Barat

Ahmad Saufi ^a dan M. Irsyad Fadoli ^b

^a Lembaga Pengembangan Masyarakat Equator

^b Program Studi Administrasi Negara Universitas Lampung

e-mail : a saufi_kayong2@yahoo.co.id, b ifadoli@yahoo.com

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 adalah sebuah kebijakan prioritas pemerintah dan memacu daerah untuk mempercepat penurunan stunting secara konvergensi. Secara kelembagaan dari tingkat pusat hingga desa dibentuk tim percepatan penurunan untuk memastikan program dan gerakan intervensi di lini lapangan yang lebih mengutamakan pendekatan keluarga. Tim pendamping keluarga merupakan kolaborasi sumber daya dari tiga unsur yakni bidan desa, kader keluarga berencana dan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pendekatan yang bersifat sensitif ini menyoar kelompok remaja, calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, serta anak dalam usia 0-59 bulan. Data survei status gizi Indonesia (SSGI) 2021, memperlihatkan indikator yang mempengaruhi stunting seperti asupan gizi, pola asuh, sanitasi dan air bersih. Kalimantan Barat adalah satu dari 12 Provinsi dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi di atas angka nasional sebesar 29,8%. Metode dalam penulisan ini mengedepankan studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber dari buku, laporan kerja, jurnal, dan mengolah serta mendeskripsikan sesuai kajian. Hasilnya adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota tidak diikuti pada tingkat desa. Belum tampak keberpihakan baik regulasi maupun penyediaan anggaran desa yang mendukung kinerja percepatan. Kepemimpinan menjadi faktor utama dalam menciptakan kebijakan inovatif dan memberi ruang partisipasi publik yang kuat. Ruang dialog antar pemangku kepentingan masih minim, sehingga lamban dalam pencapaian target. Penguatan peran kelembagaan menjadi kunci dalam membangun persepsi bersama. Komunikasi yang baik dan efektif akan membangun kepercayaan antar lembaga dalam sebuah tim.

Kata Kunci: Pendampingan Keluarga, Konvergensi, Stunting.

Institutional Strengthening in the Strategy to Accelerate Post-Covid-19 Stunting Reduction in West Kalimantan

Abstract

Presidential Regulation Number 72 of 2021 is a government priority policy and spurs regions to accelerate convergence of stunting reduction. Institutionally, from the central to the village level, an accelerated time was formed to ensure that intervention programs and movements in the field were more likely to adopt a family approach. The mentoring team is a collaboration of resources from three elements, namely village midwives, family planning cadres and family welfare empowerment cadres. This sensitive approach is for groups of teenagers, prospective brides, pregnant and lactating mothers, and children aged 0-59 months. Indonesia's nutritional status survey data (SSGI) 2021, shows indicators that affect stunting such as nutritional intake, parenting, sanitation and clean water. West Kalimantan is one of 12 provinces with the highest stunting prevalence rate above the national figure of 29.8%. The method in processing this is a literature study by collecting sources from books,

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

work reports, journals, and describing according to the study. The result is an increase in the commitment and vision of leadership from both provincial and district/city governments not being followed at the village level. There is no visible alignment of both regulations and the provision of village budgets that support accelerated performance.. Leadership is a major factor in creating innovative policies and providing a strong space for public participation. The space for dialogue between stakeholders is still minimal, so it is slow to push targets. Strengthening the role of institutions is the key in building shared perceptions. Good and effective communication will build trust between institutions in a team.

Keywords: Family Assistance, Convergence, Stunting.

A. PENDAHULUAN

Percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI tahun 2018. Sumber daya manusia Indonesia harus unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara individu maupun keluarga. Pemerintah memastikan kebijakan dan intervensi yang tepat bahwa setiap anak dapat lahir sehat, tumbuh dengan gizi yang cukup (Aziz, 2018).

Kejadian kasus yang tergolong stunting tidak hanya dominan disebabkan oleh faktor gizi spesifik yakni kekurangan asupan gizi pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).¹ Faktor gizi sensitif juga menjadi faktor yang cukup mempengaruhi juga seperti pola asuh, akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pembangunan sanitasi dan air bersih menjadi pemenuhan hak dasar dalam sebuah layanan pemerintah melalui intervensi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur. (Dobe, 2014).

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%. Angka ini terbilang memiliki tren penurunan 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018. Pemerintah menargetkan 14% pada 2024 mendatang dengan memperkuat pendampingan keluarga. Menurut Bhutta et al., (2008) stunting yang terjadi dalam periode tumbuh kembang anak akan menyebabkan penurunan dalam kemampuan kecerdasan dan lambannya pertumbuhan fisiknya. Stunting terjadi pada umur rentang dua tahun kehidupan

dan kerusakan yang ditimbulkan tidak dapat dipulihkan (Smith & Haddad, 2015). Kondisi sanitasi yang buruk sangat berpengaruh pada meningkatnya angka kesakitan, stunting dan bahkan kematian (Guerrant et al., 2013). Stunting menjadi tantangan di tengah menghadapi bonus demografi pada generasi emas tahun 2045 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan yakni kerugian terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 2-3% pertahun. Kondisi PDB Indonesia tahun 2020 sebesar 14 triliun, maka perkiraan kerugian mencapai Rp 450 triliun.²

Lantas intervensi gizi sensitif dijadikan pendekatan baru dalam percepatan penurunan stunting. Penguatan berbasis keluarga ini guna melakukan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan juga memastikan pasokan air bersih, penguatan kapasitas perempuan dan mengurangi kemiskinan (Intan, 2017).

Laporan Kementerian Kesehatan dan World Bank (2017), menyebut 1-3 rumah tangga (RT) di Indonesia masih sulit mendapatkan air bersih, serta kurangnya mendapat fasilitas jamban yang sehat. Penyebab lainnya adalah terbatasnya akses makanan bergizi di Indonesia terlihat pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia.

Peran pemangku kepentingan yang bersifat *pentahelix* sangat dibutuhkan dalam membuat otoritas dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat melalui pola kolaborasi. Peran serta masyarakat baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat

¹ Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (stunting) Periode 2018-2024. Sekretariat Wakil Presiden RI. Hlm. 10

² Penyampaian Wakil Presiden RI dalam acara Rapat Kerja Nasional Bangsa Kecanan tahun 2022

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.³ Menurut (Aryastami, 2017), diperlukan koordinasi dan sinergisitas yang kuat dan mengikat di semua tingkatan institusi dalam membuat kebijakan. Penyamaan persepsi, pengetahuan dan ruang edukasi peran dan tanggung jawab adalah usaha pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk strategi penguatan kelembagaan dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Kalimantan Barat. Peran keterlibatan sumber daya yang besar dalam intervensi percepatan pasca covid-19 juga dipotret memiliki pengaruh yang kuat dan memiliki andil dalam membangun keterhubungan antara satu lembaga dengan yang lainnya.

B. PEMBAHASAN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menjadi lembaga yang dipercaya sebagai pemimpin tim pelaksana dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki visi menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Secara kelembagaan BKKBN memiliki Balai Penyuluh Keluarga Berencana yang merupakan pusat pengendalian operasional dan pelayanan program bangsa kencana di tingkat kecamatan.⁴

Sumber daya dalam membantu operasional lini lapangan di tingkat Kecamatan dan desa terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan. Balai penyuluh di Kalimantan Barat sendiri, berjumlah sebanyak 173 (2021) dan bertambah menjadi 174 (2022) di 175 Kecamatan dari 14 Kabupaten/Kota.⁵

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 menyebutkan bahwa target dan sasaran yang terkandung dalam 5 pilar strategi nasional. Satu yang utama adalah pilar peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di K/L, pemerintah daerah (pemda) provinsi, pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa. Komitmen nyata dari pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) nomor 9 tahun 2020 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Provinsi Kalimantan Barat..

Turunan dari pilar tersebut adanya terobosan baru yakni pendekatan berbasis keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting. Pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko. Sasaran pendampingan berikan kepada calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak 0-59 bulan.⁶

Pendampingan keluarga di tingkat Desa seperti tersebut di atas secara kelembagaan dikenal dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan Desa, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Kader Keluarga Berencana. Sebaran TPK di Kalimantan Barat pada tahun 2021 berjumlah 12.609 orang dari 2.031 Desa dan 99 Kelurahan (Indri Rizkita, 2022).

Kehadiran TPK yang dibentuk akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga tindakan

dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Lini Lapangan. BKKBN. 2022. Hlm. 6

⁵ Ibid, Hlm. 48

⁶ Ibid, Hlm. 10

³ Pasal 174, ayat 1 BAB XVI Peran Serta Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁴ Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Program bangsa Kencana di Balai Penyuluh KB

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

pengecangan lain dari faktor langsung penyebab stunting. Besarnya peran pendamping keluarga berisiko stunting dalam mengawal percepatan penurunan stunting, maka diperlukan sumber daya pendampingan yang berkualitas. Di sisi lain, TPK melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang diinginkan (Supianto, 2021).

Menurut (Milen, 2004), (Rivai & Mulyadi, 2012) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kapasitas yakni komitmen bersama (*collective commitments*), kepemimpinan yang kondusif (*condusio leadership*), reformasi peraturan, dan kelembagaan, dan peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi percepatan penurunan stunting sesuai pilar pertama adalah meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas desa. Penulis uraikan beberapa turunan program dari strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rembuk Stunting

Pemerintah daerah memiliki kewajiban melaksanakan amanat Perpres Nomor 72 tahun 2021 dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara berjenjang yang memiliki tugas memperkuat fungsi koordinasikan, sinergisitas lintas sektor dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sampai pada level desa. Tim ini juga menyelenggarakan rembuk stunting selama sekali dalam satu periode anggaran.

Rembuk Stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota hingga kecamatan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara organisasi perangkat daerah keluarga berencana (OPDKB) sebagai penanggung jawab dengan institusi non-pemerintah dan masyarakat. Rembuk stunting merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan.

Rembuk stunting adalah forum dialog yang mengajak berbagai pihak pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan mengajak berkolaborasi dalam mengambil solusi di desa lokus stunting. Senada menurut (Ansell & Gash, 2008), bahwa *collaborative governance* sebagai tata pemerintahan yang baik dimana pemerintahan sangat memerlukan sumberdaya yang besar di luar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal dan membangun komitmen kerja bersama dalam sebuah jaringan.

Keberhasilan kolaborasi mengacu pada prinsip dasar tentang konsep *collaborative governance*, menurut Edralin dan Whitaker (dalam Keban, 2007) mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektifitas, konsensus dan saling menguntungkan dan memajukan.

Kehadiran aktor dalam kolaborasi memiliki inisiatif dalam melakukan sebuah tindakan yang menurut Donahue (dalam Sudarmo, 2011) ada tiga aspek penting yakni 1) aktor yang memiliki tuntunan jelas; 2) terdapat keseriusan dan mengambil peran dalam menentukan tujuan; dan 3) terciptanya hubungan saling menguntungkan dan transparan diantara pihak yang terlibat.

Rembuk stunting juga sebagai upaya memperkuat kelembagaan ditingkat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa serta organisasi masyarakat seperti Tim Pengerak PKK baik dalam dukungan anggaran maupun kebijakan turunan. Penguatan itu juga didorong dari infrastruktur anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) stunting Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar 59.423.152.000 bersifat non fisik, 12.470.099.000 bersifat fisik.

Pemerintah Kabupaten/Kota juga membuat edaran kepada kecamatan, desa/kelurahan tentang peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media dan swasta. Di samping itu, desa wajib melaksanakan amanat dari anggaran dana desa untuk percepatan penurunan stunting di lingkungannya. Sebagaimana

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

2. Mini Lokakarya

Kegiatan ini dimaksudkan pada level pemerintah kecamatan sebagai pertemuan yang diinisiasi tim Pengerak PKK dan camat dengan melibatkan Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi Dokter, Bidan, Penyuluh KB/PLKB, unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI), unsur Kantor Urusan Agama (KUA), unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Damdramil, Kapolsek dan pihak lainnya. Materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengidentifikasi kasus di tingkat desa, menyajikan data penyebab stunting, mengevaluasi dan memotivasi tim pendamping keluarga dan membuat rencana kerja bulan berikutnya.

Audit kasus stunting adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan kegiatan tematik yang melibatkan tim pakar terdiri dari Dokter dan Psikolog. BKKBN telah menjalin kemitraan dengan unsur yang tergabung dalam Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Tim pakar bertugas melaksanakan kajian kasus yang dituangkan dalam kertas kerja audit dan memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit. Selain itu, melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kepada kelompok sasaran audit. Tugas berikutnya adalah diseminasi hasil audit dan pelaksanaan pemantauan serta evaluasi rencana tindak lanjut.⁷

Audit sendiri dilakukan di desa lokus dengan sebaran di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 272 desa, dan 108 kecamatan dari 14 kabupaten/kota. Hasil audit memberikan otoritas kepada pelaksana TPPS di daerah untuk membuat kebijakan sebagai penguatan komitmen bersama agar tidak ada kasus

stunting baru (*new stunting*) dan intervensi penuh kepala keluarga beresiko untuk memastikan mendapat dukungan fasilitas.

3. Penguatan Kelembagaan Desa

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam menjaring potensi desa seperti program pusat yang telah mendorong pembangunan desa yakni program keluarga harapan (PKH), penyedia air minum dan sanitasi masyarakat (Pamsimas), dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Data statistik kesejahteraan rakyat menyebut rumah tangga di Kalimantan Barat masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum 39,97% dan 19,98% mengkonsumsi air isi ulang (BPS, 2019).

Komitmen dan kepemimpinan di tingkat desa harus mampu mendorong penganggaran yang berbasis kesehatan masyarakat seperti penyediaan sarana air bersih, jamban sehat keluarga, pelatihan pengolahan makanan bergizi dan pelatihan kapasitas kader posyandu, PKK dan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Menurut (Dianah et al., 2021) faktor dominan yang berkontribusi terhadap stunting sangat dipengaruhi oleh akses sanitasi dasar, gemar cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan peningkatan berat lahir anak melalui program perbaikan gizi di masyarakat.

Keterlibatan swasta di lingkungan desa dalam mendorong percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan melalui skema pembiayaan CSR (*corporate social responsibility*). Kader Pembangunan Manusia (KPM) bersama unsur pemerintahan desa mempunyai kewenangan mengidentifikasi cakupan layanan dan membuat pemetaan masalah dan faktor penyebab serta peran stakeholder kunci dan pendukung mengacu pada profil desa.

Pendekatan berbasis bukti dan potensi sumber daya dan intervensi yang luas dari berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan unsur di

dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hlm. 30.

⁷ Irma Ardiana. Asmy Elviana. Chairunnisa Murtiati. Izatun Nafsi. 2022. *Buku Saku Audit Kasus Stunting*. Direktorat Bina Keluarga Balita

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

desa terutama kelompok perempuan sangat penting memberikan usulan rencana kegiatan intervensi dalam mempercepat penurunan kasus stunting baik pada rembuk maupun musyawarah rencana pembangunan desa.

Penguatan kapasitas desa juga masih terlihat lemah terlihat dari tinjauan penulis dari capaian pembentukan TPPS di tingkat kecamatan/desa per 16 Juni 2022. Capaian yang bersumber dari upload SK di laman https://bit.ly/SKTPPS_KALBAR terlihat realisasi di tingkat kecamatan (95%) dan desa (82%). Lemahnya desa dalam membuat SK TPPS di atas target waktu berdasarkan 8 aksi konvergensi, disebabkan karena kurangnya koordinasi, pemahaman yang berbeda dan komitmen belum kuat terbangun antar OPDKB, kecamatan dan mitra pelaksana pada setiap tahapan yang ditentukan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan makalah ini adalah terdapat tantangan dalam peningkatan kapasitas pada penyelenggara pemerintah di level desa. Ketidakmampuan desa mengelola sumber daya dan lambannya pengetahuan dan pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan masalah stunting. Kurangnya sumber daya yang handal dan minimnya komunikasi menjadi penyebab intervensi masih sebatas administrasi.

Pendampingan yang lemah oleh OPDKB terhadap desa lokus stunting menjadi penyebab lambannya proses capaian data percepatan penurunan stunting. Belum lagi, ketersediaan akses data keluarga beresiko yang kurang dan minimnya desiminasi serta publikasi yang berkelanjutan.

Komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota tidak diikuti secara kelembagaan pada tingkat desa. Pemahaman yang terbatas, lemahnya Rumitnya pelaksanaan administrasi di tingkat TPPS desa sehingga isu stunting belum menjadi agenda bersama.

Saran dari tulisan ini adalah perlu adanya tugas pendampingan yang memperkuat komitmen dan visi kepemimpinan desa diukur dari program kerja secara periodik yang tertuang

dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Intervensi kepala daerah berupa monitoring terhadap program berkelanjutan dan akses sumber daya jaringan yang kuat memudahkan kolaborasi para pihak untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4).
<https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465>. 233-240
- Aziz, A. (2018). *Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi Di Sidang Tahunan MPR RI 2018*. Tirto.Id. <https://tirto.id/naskah-lengkap-pidato-presiden-jokowi-di-sidang-tahunan-mpr-ri-2018-cSSs>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat*.
- Bhutta, Z. A., Ahmed, T., Black, R. E., Cousens, S., Dewey, K., Giugliani, E., Haider, B. A., Kirkwood, B., Morris, S. S., Sachdev, H., & Shekar, M. (2008). What works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. *The Lancet*, 371(9610), 417-440.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61693-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61693-6)
- Dianah, Z., Fitria, L., & Wulandari, R. A. (2021). Pemodelan Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Stunting Pada Baduta Di Wilayah PKGBM Kalimantan Barat Tahun 2017. *Journal of Baja Health Science*, 1(1), 55-69. <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/adkes/article/view/1174>
- Dobe, M. (2014). Viewpoint: The Role of Sanitation in Malnutrition-A Science and Policy Controversy in India. *Journal of Public Health Policy*. Madhumita Dobe.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

2014. Viewpoint: The Role of Sanitation in Malnutrition-A Science and Policy Controversy in India. *Journal of Public Health Policy*.
- Guerrant, R. L., DeBoer, M. D., Moore, S. R., Scharf, R. J., & Lima, A. A. M. (2013). The impoverished gut – a triple burden of diarrhoea, stunting and chronic disease. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 10(4), 220–229.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1038/nrgastro.2012.239>
- Indri Rizkita. (2022). *BKKBN Kalimantan Barat Optimis Turunkan Angka Stunting jadi 14 Persen*. Sonora.id.
<https://www.sonora.id/read/423094556/bkkbn-kalimantan-barat-optimis-turunkan-angka-stunting-jadi-14-persen?page=2>
- Intan Kumalasari dan Utami Dewi. (2017). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. 6(5), 469–476.
- Milen, A. (2004). *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Pondok Pustaka Jogja.
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Raja Grafindo Persada.
- Smith, L. C., & Haddad, L. (2015). Reducing Child Undernutrition: Past Drivers and Priorities for the Post-MDG Era. *World Development*, 68, 180–204.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.11.014>
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Smart Media.
- Supianto. (2021). *Ini Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepat Penurunan Stunting*. Jurnas.com.
<https://www.jurnas.com/artikel/107733/Ini-Peran-Tim-Pendamping-Keluarga-dalam-Percepat-Penurunan-Stunting/>
- Yeremias T. Keban. (2007). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.